




Halte Ambil Hak Pejalan Kaki

■ KP4 Soroti Fasilitas Umum di Kota Yogya


**UU Nomor 22
Tahun 2009
pasal 131 berbunyi, pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain**

YOGYA, TRIBUN - Bukan pemandangan baru bila trotoar di Kota Yogyakarta masih penuh dengan perabotan yang mengganggu aktifitas pejalan kaki. Tak hanya aktivitas perekonomian yang ada di atas trotoar, halte Trans Jogja yang juga berada di atas trotoar dinilai telah mengambil hak pejalan kaki.

Kondisi ini mendapatkan sorotan dari Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Kota Yogyakarta. Perwakilan KP4 Kota Yogyakarta, Harta Nining Wijaya menyayangkan langkah yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Nining, selain penempatan yang tidak strategis, pemerintah yang seharusnya

memberikan contoh kepada masyarakat dinilai gagal dan justru menyalahi aturan.

"Halte ini yang punya siapa? Pemerintahnya sendiri melanggar, apalagi masyarakat umum," ujarnya saat membahas permasalahan trotoar Kota Yogyakarta di ORI Perwakilan DIY, Selasa (23/1).

Ditegaskan Nining, kebijakan terkait trotoar telah diatur di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. "UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 131 berbunyi, pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain," ujarnya.

● ke halaman 19

Halte Ambil Hak Pejalan Kaki

● Sambungan Hal 13

"Sementara Peraturan Menteri tertuang pada Permen PU Nomor 3 Tahun 2014, yakni jalur pejalan kaki yang sejajar dengan jalan, sedikit lebih tinggi, untuk menjamin keselamatan pejalan kaki," katanya.

Dia menyoroti pemerintah daerah yang kurang peduli dengan difabel. Hal tersebut diutarakannya terkait penggunaan *guiding block* yang masih belum tepat di beberapa titik.

"*Guiding block* ini bukan cuma pemanis. Tapi fungsinya sangat penting bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat. Kalau ada pohon atau tiang listrik, sudah seharusnya *guiding block* dibelokkan, bukan justru tetap dipasang lurus biar bagus," kata Harta Nining Wijaya.

Menurut dia, selain alih fungsi trotoar sebagai halte Trans Jogja, permasalahan lain yang kerap ditemui di trotoar Kota Yogyakarta adalah trotoar yang menjadi lahan parkir motor, arena penjualan, pangkalan taksi dan

ojek, area pemasangan iklan, dan sebagainya.

"Bukan tidak mungkin sebenarnya permasalahan kemacetan di Kota Yogya bisa diselesaikan dengan membenahi trotoar. Kalau trotoar nyaman dan lebar, pasti banyak yang memilih untuk berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan pribadi," ujarnya.

Harus Penuhi Syarat

Sementara itu, Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masthuri mengatakan, trotoar yang sehat seharusnya bebas dari aspek ekonomi, memiliki penempatan yang tepat, dimensi yang tepat untuk jalur pejalan kaki minimal lebar 2 meter.

Selain itu, juga harus memiliki struktur dan kemiringan yang bagus, yakni untuk melintang 2-4 persen, memiliki penutup lubang drainase, dan sebagainya. "Beberapa trotoar dibangun di atas drainase, tapi seringkali kami menemukan masih terbuka," ujar Budhi.

Budhi juga menuturkan bahwa masih banyak trotoar di Kota Yogyakarta yang belum memenuhi standar sebuah trotoar. Idealnya trotoar di Kota Yogyakarta itu seperti di Kota Bandung atau Kota Surabaya.

"Sebenarnya Yogya juga punya trotoar yang enak buat pejalan kaki, yakni di Malioboro. Harapannya bisa seperti itu untuk semua Yogya," tuturnya.

Kepentingan Umum

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Porerwadi menjelaskan, bahwa soal penempatan halte Trans Jogja merupakan wewenang dari Dinas Perhubungan DIY, sementara trotoar masuk dalam ranah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (PU PKP) Kota Yogyakarta.

"Pada prinsipnya, kalau itu menyangkut halte memang dimungkinkan ada di trotoar karena itu untuk kepentingan umum apalagi itu Trans Jogja butuh tangga (halte) yang tinggi," ujarnya, Selasa (23/1).

Heroe menambahkan, halte masih dimungkinkan ditempatkan di atas trotoar. Namun demikian, ada hal yang menurutnya perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait.

"Setiap trotoar ada *guiding block* untuk teman-teman difabel. Kalau ada penempatan halte di trotoar, jangan sampai menutupi *guiding block*, dan boleh menutup akses pejalan kaki," tegasnya. (kur)

Pengguna Trotoar Tidak Terganggu

KETUA Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Christiani Agustiani menjelaskan, bahwa di luar kawasan pedestrian Malloboro, masyarakat Yogyakarta belum bisa memanfaatkan trotoar secara maksimal, sehingga keberadaan halte Trans Jogja di atas trotoar bukanlah masalah yang serius.

"Sekarang ini, lebih banyak masyarakat

yang menggunakan transportasi umum dari pada yang berjalan kaki. Jadi menurut saya keberadaan halte di trotoar tidak mengganggu," ujarnya, Selasa (23/1).

Ana, sapaan akrabnya, menambahkan bila ada warga yang menuntut bahwa tidak ada lagi halte di atas trotoar karena mengurangi ruang pejalan kaki, maka tidak hanya halte yang harus di-

bersihkan dari atas trotoar, namun juga PKL, parkir, dan semua aspek lain yang saat ini memenuhi trotoar.

"Kalau kita menuntut itu (halte tidak di atas trotoar), maka PKL juga harus bersih, karena Trans Jogja dibutuhkan masyarakat juga," ucapnya.

● **halaman 19**

Pengguna Trotoar Tidak Terganggu

● Sambungan Hal 13

Walau demikian, Politisi Gerindra tersebut mengatakan pemerintah harus memberikan perhatian terhadap tampilan halte yang di beberapa tempat dianggap tidak layak dan membuat kesan yang kumuh di trotoar.

"Ada itu, saya lupa, halte seperti ditutupi gordena atau apa ya. Kesannya tidak layak dan kelihatan kotor. Ya tolong lah pemerintah mempercan-

tik halte di samping mengupayakan trotoar yang bersih dan juga indah," tandasnya.

Belum Nyaman

Sementara itu, Anggota Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta Bidang Pemantauan dan Investigasi, Baharuddin Kamba menjelaskan, kenyamanan trotoar belum sepenuhnya dinikmati oleh semua pengguna jalan. Termasuk para difabel yang masih kesulitan mengakses trotoar karena tidak ramah difabel.

"Persoalan keberadaan PKL, parkir, dan sempitnya lahan menjadi persoalan ha-

rus diperhatikan oleh Pemkot," jelasnya.

Terkait trotoar yang menjadi tempat berdirinya halte Trans Jogja, Kamba mengatakan bahwa itu merupakan hal yang wajar karena memang sudah tidak ada lahan.

"Ya karena sudah tidak ada lahan, maka trotoar dijadikan tempat halte. Tidak halnya di Jogja, di tempat lain juga terjadi hal yang sama trotoar dijadikan halte bus. Nah mungkin ke depan bisa dipikirkan agar halte bus tidak menggunakan trotoar tapi agak sulit mencari lahan," bebarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005